

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020

Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai

HSU - Kalimantan Selatan 71418

Telp. 051731012 Fax. 051731012

e-mail : pa.amuntai@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Empu Mandastna No.10 Amuntai

Telp. 052761002 Fax. 052763037

Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan 71418

e-mail : pa.amuntai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Amuntai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai Per 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Amuntai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hulu Sungai Utara, 13 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

Salmant, S.Ag.

NIP. 197305072001121004



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	i
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	6
II. Neraca.....	8
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	15
A. Penjelasan Umum.....	15
A.1. Dasar Hukum	15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai.....	17
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.4. Basis Akuntansi	18
A.5. Dasar Pengukuran	18
A.6. Kebijakan Akuntansi	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	27
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	27
B.2. Belanja	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
C.1. Aset Lancar	33
C.2. Aset Tetap.....	35
C.3. Aset Lainnya.....	40
C.4. Kewajiban Jangka Pendek.....	42
C.5. Ekuitas	43
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	44
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	44

D.2.	Beban Pegawai	44
D.3.	Beban Persediaan	45
D.4.	Beban Barang dan Jasa	45
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	46
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	46
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	47
D.8.	Beban Bantuan Sosial	48
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	48
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	49
D.11.	Beban Lain-lain	49
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	50
D.13.	Pos Luar Biasa	51
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
E.1.	Ekuitas Awal.....	51
E.2.	Surplus (defisit) LO	51
E.3.	Penyesuaian Nilai aset.....	51
E.4.1	Koreksi Nilai Persediaan.....	51
E.4.2.	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	52
E.4.3.	Koreksi atas Beban	52
E.4.4	Koreksi atas Pendapatan.....	53
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	53
E.6.	Ekuitas Akhir	54
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	54
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	54
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	54
	Laporan-laporan Pendukung.....	56
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	57
	Daftar Hibah Langsung	61
	Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	61

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019	2
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2020 dan 2019.....	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	25
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat	26
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2020.....	27
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2020 dan 2019.....	28
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 DesemberTA 2020	28
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020.....	29
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 DesemberTA 2020 dan TA 2019	29
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 DesemberTA 2020 dan TA 2019.....	30
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 DesemberTA 2020 dan TA 2019.....	31
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 31 DesemberTA 2020 dan TA 2019.....	32
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019	33
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	33
Tabel 15 Rincian Belanja Dibayar di Muka	34
Tabel 16 Rincian Aset tak Berwujud.....	41
Tabel 17 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	63

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Amuntai

Jl. Empu Mandastana No.10 By Amuntai - Kalimantan Selatan 71418

Telp. 052761002 Fax. 052763037 e-mail : pa.amuntai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember 2020 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hulu Sungai Utara, 13 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

Salmari, S.Ag

NIP. 197305072001121004



RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan keuangan kementerian Negara / Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 yang telah diubah menjadi PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 9.208.174 atau mencapai 229,69 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.4.135.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 4.525.834.286 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,87% dari anggaran senilai Rp. 4.531.735.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	4.135.000	9.208.174	222,69	3.025.388
Belanja Negara	4.531.735.000	4.525.834.286	99,87	5.321.652.075

1. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan 2019.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.9.549.465.713 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.625.500; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.9.548.646.613; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.1.918.180 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.1.918.180.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.9.547.547.533

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	625,500	90,500	535,000	591.16
Aset Tetap	9,548,646,613	9,859,306,858	(310.660.245)	(3.15)
Aset Lainnya	193.600	0	193.600	0,00
Jumlah Aset	9.549.465.713	9.859.397.358	(309.931.645)	(3.14)

Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.918.180	6.183,064	(4.264.884)	(68,97)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	1.918.180	6,183,064	(4.264.884)	(68,97)
Ekuitas	9.547.547.533	9,853,214,294	(305.666.761)	(3,10)
Jumlah Ekuitas	9.547.547.533	9,853,214,294	(305.666.761)	(3,10)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	9.549.465.713	9,859,397,358	(309.931.645)	(3,14)

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.808.174, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 4.831.415.547 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 4.827.607.373). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 5.314.500 dan surplus (defisit) dari Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar (Rp. 4.822.292.873).

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 9.853.214.294 dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 4.822.292.873) dan penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar Rp. 0 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (0) dan Selisih Revaluasi Aset tetap Rp. 0 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.516.626.112 Sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 9.547.547.533

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui

berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2020 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. *LRA PERBANDINGAN*

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.1	4.135.000	9.208.174	222.69	3.025.388
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		4.135.000	9.208.174	222.69	3.025.388
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	3.421.735.000	3.418.798.058	99.92	4.355.594.587
2. Belanja Barang	B.2.2.	1.085.244.000	1.082.036.228	99.70	889.277.488
3. Belanja Modal	B.2.3.	25.000.000	25.000.000	100	76.780.000
Jumlah Belanja Negara		4.531.735.000	4.525.834.286	99.87	5.321.652.075

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI NERACA PER 31 Desember 2020 DAN 2019 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	625.500	90.500
Jumlah Aset Lancar		625.500	90.500
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	3.440.401.000	3.440.401.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.649.932.652	2.755.690.172
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.170.361.000	6.170.361.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	5.643.998	5.643.998
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.717.692.037)	(2.512.789.312)
Jumlah Aset Tetap		9.548.646.613	9.859.306.858
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	130.757.520	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(130.563.920)	(0)
Jumlah Aset Lainnya		193.600	0
Jumlah Aset		9.549.465.713	9.859.397.358
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	1.918.180	6.183.064
Hibah yang belum disahkan	C.5. 2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.918.180	6.183.064
Jumlah Kewajiban		1.918.180	6.183.064
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	9.547.547.533	9.853.214.294
Jumlah Ekuitas		9.547.547.533	9.853.214.294
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		9.549.465.713	9.859.397.358

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	DESEMBER 2020	DESEMBER 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.808.174	3.025.388
Jumlah Pendapatan		3.808.174	3.025.388
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.418.798.058	4.355.594.587
Beban Persediaan	D. 3	31.132.500	38.552.800
Beban Barang dan Jasa	D. 4	679.337.783	498.636.577
Beban Pemeliharaan	D. 5	303.114.795	293.728.000
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	63.565.766	58.683.004
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	335.466.645	369.114.095
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		4.831.415.547	5.614.309.063
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.827.607.373)	(5.611.283.675)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		5.400.000	0
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	(737.063.028)
Surplus dari kegiatan non operasional lainnya		(85.500)	(46.700)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		5.314.500	(737.109.728)

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	5.314.500	(737.109.728)
Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(4.822.292.873)	(6.348.393.403)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Catatan	DESEMBER 2020	DESEMBER 2019
Ekuitas Awal	E. 1	9.853.214.294	7.482.467.820
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4.822.292.873)	(6.348.393.403)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		0	0
Lain-lain		0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	
Selisih Revaluasi aset tetap	E. 4	0	0
s Koreksi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 6	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 7	0	0
Selisih Revaluasi aset tetap	E. 8	0	0
Koreksi Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 9	4.516.626.112	8.719.139.877
Ekuitas Akhir		9.547.547.533	9.853.214.294

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. PMK Nomor 104/PMK.05/2018 tentang pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Lingkup bendahara Bendahara Umum Negara dan kementerian Negara/Lembaga
- n. PMK Nomor 213/PMK.05/2013 yang telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/Pmk.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 Yang Telah Diubah Menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat
- p. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 Tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- q. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-625/PB/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Tentang Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai

Visi Pengadilan Agama Amuntai adalah terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Amuntai adalah

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Amuntai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Profesionalisme pelayanan aparaturnya yang netral, bersih dan berwibawa
2. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri, independen dan kredibel.
3. Meningkatkan akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan
5. Terwujudnya koordinasi kinerja yang baik, baik dari koordinasi kinerja di bidang yudisial maupun koordinasi kinerja administrasi umum/sekretaris pengadilan.
6. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi koordinasi penyusunan program dan anggaran
7. Terwujudnya efektivitas pembinaan, pengawasan dan valuasi serta pelaporan kinerja
8. Terwujudnya kualitas hubungan kerja sama antar instansi terkait;
9. Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.

Motto Pengadilan Agama Amuntai yaitu **SMART** (Sopan, Modern, Akuntabel, Ramah dan Transparan)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan PMK No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2016 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2016 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai Tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016 dan dilanjutkan hingga Tahun 2020.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
9.208.174*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 9.208.174 atau mencapai 222.69 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4.135.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
3.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	4.135.000	9.208.174	222.69
Total Pendapatan		4.135.000	9.208.174	222.68

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.002.786 atau 198.41 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena penjualan peralatan kantor berupa lelang meubelair dengan nomor 308/58/2020 tanggal 2020.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2019	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
3.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	9.208.174	3.205.388	6.002.786	198.41
Total Pendapatan		3.025.388	3.205.388	6.002.786	198.41

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :Rp.
4.525.834.286

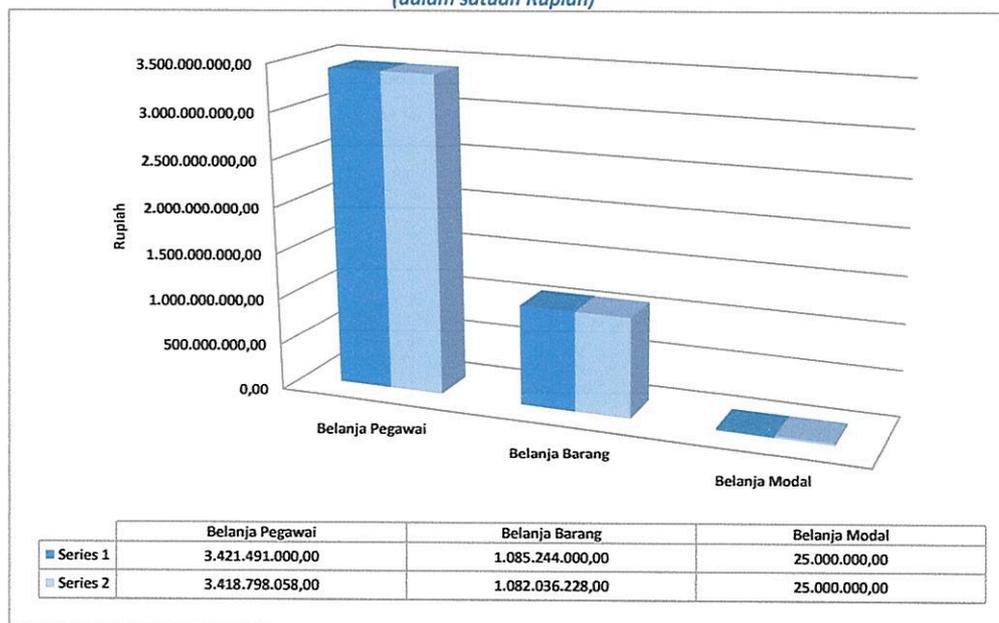
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 4.525.834.286 setelah dikurangi pengembalian belanja 99.87 % dari anggaran senilai Rp. 4.531.735.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.421.491.000	3.418.798.058	99.92
Belanja Barang	1.085.244.000	1.082.036.228	99.70
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100
Total Belanja Bruto	4.531.735.000	4.525.834.286	99.87
Pengembalian Belanja		185.000	0.00
Total Belanja Netto	4.531.735.000	4.526.019.286	99.59

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2019

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (795.817.789) atau sebesar (14.95) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya beberapa pegawai yang mutasi ke atau promosi ke Pengadilan Agama Lain Tahun 2020 sehingga berdampak pada realisasi anggaran belanja terutama Belanja Pegawai di Kantor pengadilan Agama Amuntai.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	3.418.834.286	4.355.594.587	(936.796.529)	(21.50)
Belanja Barang	1.082.036.228	889.277.488	192.758.740	21.67
Belanja Modal	25.000.000	76.780.000	(51.780.000)	(67.43)
Total Belanja	4.525.834.286	5.321.652.075	(795.817.789)	(14.95)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
3.418.798.058*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 3.418.798.058 dan Rp. 4.355.594.587.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 936.796.529 atau 21.50 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain adanya Belanja mutasi dan promosi Pegawai tahun 2020 sehingga menurunnya realisasi belanja pegawai pada Pengadilan Agama Amuntai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.295.511.940	1.591.320.027	(295.808.087)	(18.58)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.005	21.164	(4.159)	(19.65)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	94.082.840	115.309.950	(21.227.110)	(18.40)
Belanja Tunj. Anak PNS	29.692.796	37.327.522	(7.634.726)	(20.45)
Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	35.860.000	540.000	1.50
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.409.560.000	1.873.560.000	(464.000.000)	(24.76)
Belanja Tunj. PPh PNS	191.112.217	264.264.884	(73.152.667)	(27.68)
Belanja Tunj. Beras PNS	58.153.260	69.668.040	(11.514.780)	(16.52)
Belanja Uang Makan PNS	226.418.000	291.675.000	(65.257.000)	(98.73)
Belanja Tunjangan Umum PNS	4.652.000	6.845.000	(2.220.000)	(32.43)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	105.300.000	135.000.000	(29.700.000)	(22.00)
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	3.418.798.058	4.355.594.587	(936.796.529)	(21.51)
Pengembalian Belanja	0	0	0	
Total Belanja Netto	3.418.798.058	4.355.594.587	(936.796.529)	(21.51)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
1.082.036.228

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.082.036.228 dan Rp. 872.977.488.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 209.058.740 atau 23.94 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya peningkatan kebutuhan pelaksanaan belanja barang terutama barang keperluan operasional dan pemeliharaan pada periode berjalan atau per 31 Desember 2020

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	557.324.827	406.243.439	151.081.388	37.18
Belanja Barang Persediaan	44.594.400	44.341.000	253.400	0.57
Belanja Jasa	126.277.840	92.401.045	33.876.795	36.66
Belanja Pemeliharaan	290.273.395	287.609.000	2.664.395	0.92
Belanja Perjalanan Dinas	63.565.766	42.383.004	21.182.762	49.97
Total Belanja Bruto	1.082.036.228	872.977.488	209.058.740	23.94
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.082.036.228	872.977.488	209.058.740	23.94

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal :Rp.
25.000.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 76.780.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 51.780.000 atau 67.43 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019 Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan anggaran khususnya anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2020.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan & Mesin	25.000.000	76.780.000	(51.780.000)	(67.43)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	25.000.000	76.780.000	(51.780.000)	(67.43)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	25.000.000	76.780.000	(51.780.000)	(67.43)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 625.500

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 625.500 dan Rp. 90.500.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	625.500	90.500
Total Aset Lancar	625.500	90.500

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2020	31 Desember TA 2019
1.	Bank BRI KC. Amuntai	0	0
2.	Uang Tunai	0	0
	Jumlah	0	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 merupakan Uang Persediaan yang masih dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan karena masih menjadi aset lancar bersama Persediaan sehingga saldo tersebut masih berada pada kas bendahara pengeluaran.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 15 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2020	31 Desember TA 2019
1	Persekot Gaji Pegawai	0	0
Jumlah		0	0

Belanja Di bayar di Muka per 31 Desember 2019 merupakan belanja pegawai persekot gaji karena pindah pada periode sebelumnya namun pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2019 sudah dibayarkan secara penuh sehingga Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 menjadi Rp.0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 625.000*

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 625.500 dan Rp. 90.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	625.500	90.500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		625.500	90.500

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp.
9.877.633.258

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp. 9.877.633.258 dan Rp. 7.488.190.791 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	3.440.401.000	3.440.401.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.649.932.652	2.755.690.172	(105.757.520)
3	Gedung dan Bangunan	6.170.361.000	6.170.361.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0

6	Aset Tetap Lainnya	5.643.998	5.643.998	0
	Jumlah	12.266.338.650	12.372.095.998	(105.757.348)
	Akumulasi Penyusutan	(2.717.692.037)	(2.512.789.312)	(204.902.725)
	Nilai Buku Aset Tetap	9.548.646.613	9.859.306.858	(310.660.245)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
3.440.401.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.440.401.000 dan Rp. 3.440.401.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	197 m ²	54/Sungai Malang/2012	Mahkamah Agung	Gedung Kantor	3.229.611.000
2.	2			Mahkamah Agung	-	210.790.000
Jumlah						3.440.401.000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 September 2020 mengalami perubahan karena adanya laporan hasil inventaris dan penilaian bmn sesuai nomor LHIP: 65/WKN.12/KNL.03/2019 pada tanggal pelaporan. Tanah tersebut seluas 197 M² yang terletak di Jalan empu Mandastana No. 10 Amuntai Kabupaten HSU yang merupakan tanah bangunan kantor pemerintah.

Saldo per 31 Desember 2019	210.790.000
Mutasi Tambah	0
Hibah	3229.611.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 DESEMBER 2020	3.440.401.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2019	(0)

Nilai Buku 30 Desember 2020	3.440.401.000
-----------------------------	---------------

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
2.649.932.652*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.649.932.652 dan Rp. 2.755.690.172.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	2.755.690.172
Mutasi Tambah	
- Pembelian	0
- Transfer Masuk dari MA	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 30 Desember 2019	2.755.690.172
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2019	(105.757.520)
Nilai Buku 30 Desember 2019	2.649.932.652

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan karena adanya mutasi masuk atau yaitu adanya realisasi Anggaran pengadaan peralatan dan mesin dan transfer masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang terjadi pada tanggal pelaporan.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
6.170.361.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.170.361.000 dan Rp. 6.170.361.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	6.927.898.000
----------------------------	---------------

Mutasi Tambah	
Revaluasi BMN	0
Mutasi Kurang	
	757.537.000
Saldo per 31 Desember 2020	6.170.361.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 DESEMBER 2020	(0)
Nilai Buku 31 DESEMBER 2020	6.170.361.000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
5.643.998*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.643.998 dan Rp. 5.643.998.

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 tidak mengalami perubahan karena tidak adanya mutasi masuk atau keluar pada saat tanggal pelaporan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 tersebut pada laporan barang kuasa Pengguna semestrian Pengadilan Agama Amuntai dengan rincian bahan perpustakaan senilai Rp.5.643.998 dan barang bercorak kesenian sebesar Rp.0

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	5.643.998
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 30 Desember 2020	5.643.998
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 20120	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	5.643.998

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp.
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pada tanggal pelaporan tidak terdapat Konstruksi Dalam pekerjaan.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-

tetap : Rp. masing Rp. (2.717.692.037) dan Rp. (2.512.789.312).
(2.717.692.037)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	3.440.401.000	0	3.440.401.000
1	Peralatan dan Mesin	2.755.690.172	105.757.520	2.649.932.652
2	Gedung dan Bangunan	6.170.361.000	0	6.170.361.000
3	Konstruksi Dalam Pekerjaan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	5.643.998	0	5.643.998
Jumlah		12.372.096.170	105.757.520	12.266.338.650

Aset Lainnya:
Rp. 0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 20 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0
Nilai perolehan Aset Lainnya		0	0

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud :
Rp. 0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Portal Putusan	0
2.	Aplikasi Bindalmin	0
Jumlah Total		0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 pada Pengadilan Agama Amuntai berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2020 sehingga tidak ada perubahan saldo aset tersebut pada tanggal pelaporan

C.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp. 0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Amuntai serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	0

Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	0

C.3.3. Aset Lain-lain yang belum dregister

Aset Lain-lain :
Rp. 0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	0

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek :
Rp. 6.183.064

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.183.064 dan Rp. 7.482.467.820. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan , sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp.6.183.064

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Amuntai per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 22. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Utang Kepada Pihak Ketiga	1.918.180	6.183.064
Hibah yang belum disahkan	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	1.918.180	6.183.064

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp. 1.918.180

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.918.180 dan Rp. 6.183.064. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Amuntai per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Barang yang masih harus dibayarkan	0	0
	Jumlah	0	0

C.4.2. Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah yang belum disahkan: Rp.0

Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0 dan 0

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

ekuitas: Rp. 9.547.547.533

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.547.547.533 dan Rp. 9.853.214.294. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan Pnbp
: Rp. 3.025.388*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.3.025.388 dan Rp4.169.445. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 24 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.135.000	3.808.174	92,09
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
6.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Total Pendapatan		4.135.000	3.808.174	92,09

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai :
Rp.
4.355.594.587*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.4.355.594.587 dan Rp. Rp.6.132.942.947. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 25 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.295.511.940	1.591.320.027	(295.808.087)	(18,58)
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.005	21.164	(4.159)	(19,65)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	94.082.840	115.309.950	(21.227.110)	(18,40)

Beban Tunj. Anak PNS	29.692.796	37.327.522	(7.634.726)	(20.45)
Beban Tunj. Struktural PNS	35.860.000	35.860.000	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.409.560.000	1.873.560.000	(464.000.000)	(24.76)
Beban Tunj. PPH PNS	191.112.217	264.264.884	(73.152.667)	(27.68)
Beban Tunj. Beras PNS	58.153.260	69.668.040	(11.514.780)	(16.52)
Beban Uang Makan PNS	194.343.000	226.418.000	(32.075.000)	(14.16)
Beban Tunjangan Umum PNS	4.652.000	6.845.000	(2.220.000)	(32.43)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	105.300.000	135.000.000	(29.700.000)	(22.00)
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	3.418.798.058	4.355.594.587	(936.796.529)	(21.51)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
: Rp.31.132.500

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.132.500 dan Rp. 38.552.800. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	31.132.500	38.552.800	(7.420.300)	(19.25)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	31.132.500	38.552.800	(7.420.300)	(19.25)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp.
679.337.783

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 679.337.783 dan Rp. 498.636.577. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	122.012.956	93.925.138	28.087.818	29.90
Beban barang operasional	556.054.427	403.211.439	152.842.988	37.90
Beban Jasa Pos dan Giro	1.270.400	1.500.000	(230.000)	(15.33)
Beban Jasa Konsultan		0		
Beban Jasa Lainnya		0		
Total Beban Barang Dan jasa	679.337.783	498.636.577	180.701.206	36.23

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp. 303.114.795*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 303.114.795 dan Rp. 293.728.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	138.246.000	138.215.000	31.000	0.02
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	23.000.000	18.500.000	4.500.000	24.32
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.027.395	130.894.000	(1.866.605)	(1.42)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	12.841.400	6.119.000	6.722.400	109.86
Total Beban Pemeliharaan	303.114.795	293.728.000	9.386.795	3.19

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas : Rp.
65.565.766*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 63.565.766 dan Rp. 58.683.004. Beban tersebut adalah

merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	63.565.766	58.683.004	4.882.762	8.32
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	63.565.766	58.683.004	4.882.762	8.32

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2019. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk	0	0	0	0

Diserahkan kepada Masyarakat

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 DESEMBER 2018 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
335.466.645

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 335.466.645 dan Rp. 369.114.095. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	199.094.265	232.935.315	(33.841.050)	(14.52)

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	136.178.780	136.178.780	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	193.600	0	193.600	0
Jumlah Penyusutan	335.466.645	369.114.095	(33.647.450)	(9.11)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	335.466.645	369.114.095	(33.647.450)	(9.11)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain :
Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja

Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non Operasional :
Rp. 5.314.500

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non	5.400.000	(737.063.028)	742.463.028	100.73
Lancar				
Penjualan Alat Angkut	0	0	0	0
Darat				
Defisit Penjualan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				
Penjualan Alat Kantor	(85.500)	(46.700)	(38.800)	83.08
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	5.314.500	(737.109.728)	(742.424.228)	(100.70)

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 36 Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp.9.547.547.533*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.547.547.533 dan Rp. 9.853.214.294.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.(4.822.292.873) dan Rp.(6.348.393.403) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai aset

*Penyesuaian Nilai
Aset : Rp. 0*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0. penyesuaian Nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan : Rp. 0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-

masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 37 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih revaluasi
Aset Tetap Rp 0

Selisih revaluasi aset tetap 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0

E.4.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset
Tetap : Rp. 0

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.4.4. Koreksi atas Beban

Koreksi Aset
Beban : Rp.0

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 38 Rincian Koreksi atas Beban
per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0

Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.4.5 Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 39 Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi antar
entitas : Rp.
4.516.834.286*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 4.516.626.112 dan Rp 8.719.139.877 Rincian Transaksi antar Entitas dari :

Table 40. Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Uraian	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(9.208.174)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.525.834.286
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Total Transaksi antar Entitas	4.516.834.286

E.6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.9.547.547.533*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.547.547.533 dan Rp 9.853.214.294

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual pada Laporan keuangan per 31 Desember tahun 2020.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Amuntai pada DIPA 402556 adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Amuntai A/C 0147-01-000078-30-8 a.n. BPG 151 PA AMUNTAL yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA yang dapat dijabarkan Di Pengadilan Agama Amuntai sebagai berikut:

- 1) Revisi ke 1 tanggal 16 April 2020 yaitu perubahan atau pergeseran rincian anggaran satu output dalam hal pagu anggaran tetap serta perubahan/ralat administrasi karena ralat rencana penarikan dana dan penerimaan hal III DIPA

- 2) Revisi ke 2 tanggal 29 Mei 2020 adanya penambahan pagu belanja yang telah dilakukan Eselon I khususnya belanja barang dan belanja modal
- 3) Revisi ke 3 Tanggal 19 Agustus 2020 adanya penambahan Anggaran dari Eselon I khususnya belanja barang sewa rumah dinas
- 4) Revisi ke 4 Tanggal 23 September 2020 rencana penarikan dana dan penerimaan hal III DIPA Dan pergeseran rincian anggaran satu output dalam hal pagu anggaran tetap
- 5) Revisi ke 5 Tanggal 5 November 2020 tentang Revisi pengurangan pagu belanja yang telah dilakukan Eselon I khususnya belanja pegawai tahun 2020
- 6) Revisi ke 6 tanggal 29 November 2020 Revisi rencana penarikan dana dan penerimaan hal III DIPA
- 7) Revisi ke 7 Tanggal 20 Desember 2020 tentang Revisi pengurangan pagu belanja yang telah dilakukan Eselon I khususnya belanja pegawai tahun 2020

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 tidak terdapat Ralat SPM. Tentang ralat SPM Karena adanya kesalahan dalam penginputan dana.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Pada Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020 terdapat catatan penting lainnya yaitu adanya perubahan SK dari Ketua Pengadilan Agama Amuntai tentang perubahan kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang dari yang sebelumnya dipegang oleh Bapak Suaifuddin, S.Ag. dengan nomor SK W15-A2/2591/KU.01/12/2019 menjadi dipegang oleh Bapak Salmani, S.Ag dengan nomor SK W15-A2/1762/KU.01/10/2020

LAPORAN PENDUKUNG

*A. Rincian Nilai perolehan, Akumulasi
Penyusutan dan Nilai Buku Aset per
31 Desember 2020*

Pengadialan Agama Amuntai
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Priode yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

KODE	URAIAN	MASA MANFAAT	NILAI PEROLEHAN	AK. PENYUSUTAN PER 31 Desember 2020	BEBAN PENYUSUTAN PER 2020	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	4	5	6	7	8	9	10
132111	PERALATAN DAN MESIN	503	2.766.790.472	2.008.596.437	232.935.315	0	2.241.535.315	515.258.420
3.01.03	ALAT BANTU	1	199.765.500	67.075.856	28.537.928	0	85.613.784	114.151.716
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	8	602.789.919	602.789.919	0	0	622.243.787	0
3.05.01	ALAT KANTOR	76	272.647.000	211.762.800	35.159.800	0	254.833.600	17.813.400
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	315	673.857.893	539.283.754	50.549.349	0	589.806.103	84.024.790
3.06.01	ALAT STUDIO	12	44.959.000	18.094.200	7.378.200	0	25.472.400	19.486.600
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	1	5.544.000	5.544.000	0	0	5.544.000	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	55	665.459.270	391.926.248	79.083.685	0	471.009.933	194.449.337
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	34	289.352.590	172.651.660	31.797.353	0	204.449.013	85.903.577

Laporan-laporan Pendukung

133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	6	6.179.706.000	156.889.308	136.415.337	(20.473.972)	272.830.673	5.906.874.32
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	5.545.777.000	134.147.942	113.673.971	(20.473.972)	227.347.941	5.318.429.059
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	471.107.000	18.817.968	18.817.968	0	37.635.936	433.471.064
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	1	182.821.000	3.923.398	3.923.398	0	7.846.796	154.974.204
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	0	0	0	0	0	0	0
3.01.03	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
3.03.03	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0
3.06.01	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0

3.10.01	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyesuaian Aset Tetap			8.936.495.172	2.155.485.745	369.350.652	(20.473.972)	2.514.362.425	6.422.132.747	
Jumlah Akumulasi Penyesuaian Aset Tetap dan Aset Lainnya			8.936.495.172	2.155.485.745	369.350.652	(20.473.972)	2.514.362.425	6.422.132.747	

Laporan Kondisi Barang

SURAT MASUK DAN KELUAR 2020

x

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
Laporan Keuangan

005

01

1500

402525

DATA PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 DESEMBER TAHUN 2020

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}